

KEKUATAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Muhammad Andi Septiadi

Program Studi Ilmu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

E-mail: Septiadi.andi90@uinsgd.ac.id

Diterima : 1 September 2020, Revisi : 3 November 2020 Disetujui : 5 November 2020

ABSTRACT

Any educational policy, especially with regard to the learning process, must be directed to the best interests of students and the general public. However, policymakers find it difficult to incorporate student and public interests into education policy. This is due to the fact that the policy-making process is almost never value-free, and therefore various interests will continue to influence the process. At this level, the interests of students and the general public are often neglected, and the government prioritizes the interests of the capitalist society above the interests of society as a whole in policy making. The link between education and politics is very close, and it can be observed in these circumstances that state politics plays an important role in determining the educational growth path of a country. The link between education and politics is very close, and it can be observed in these circumstances that state politics plays an important role in determining the educational growth path of a country.

Keywords: Education, Politics, Curriculum

ABSTRAK

Setiap kebijakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran, harus diarahkan untuk kepentingan terbaik siswa dan masyarakat umum. Namun, para pembuat kebijakan merasa sulit untuk memasukkan kepentingan siswa dan publik ke dalam kebijakan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses pembuatan kebijakan hampir tidak pernah bebas nilai, dan oleh karena itu berbagai kepentingan akan terus mempengaruhi proses tersebut. Pada tataran ini, kepentingan mahasiswa dan masyarakat umum seringkali terabaikan, dan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat kapitalis di atas kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam pengambilan kebijakan. Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat, dan dapat diamati dalam keadaan ini bahwa politik negara memainkan peran penting dalam menentukan jalur pertumbuhan pendidikan suatu negara. Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat, dan dapat diamati dalam keadaan ini bahwa politik negara memainkan peran penting dalam menentukan jalur pertumbuhan pendidikan suatu negara.

Kata Kunci : Pendidikan, Politik, Kurikulum

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran dimana peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, kemandirian, dan kemandirian. penguasaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan martabatnya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 menjadi landasan legislatif bagi pelaksanaan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang bermutu di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Kenyataannya, implementasi yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas masih gagal memberikan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil/kabupaten. Mereka kekurangan sarana dan prasarana pendukung seperti yang terdapat di kota-kota besar, teknologi informasi belum tercapai, tertinggal dalam kancan ekonomi, dan tidak ada lapangan pekerjaan.

Kebijakan pendidikan harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berwawasan global dan bermakna bagi perkembangan moral, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam rangka membangun masyarakat yang beradab dan bermanfaat, terampil, demokratis, damai, adil, dan sangat kompetitif, memungkinkan kehidupan manusia untuk berkembang.

Setiap kebijakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran, harus diarahkan untuk kepentingan terbaik siswa dan masyarakat umum. Namun, para pembuat kebijakan merasa sulit untuk memasukkan kepentingan siswa dan publik ke dalam kebijakan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses pembuatan kebijakan hampir tidak pernah bebas nilai, dan oleh karena itu berbagai kepentingan akan terus mempengaruhi proses tersebut. Pada tataran ini, kepentingan mahasiswa dan masyarakat umum seringkali terabaikan, dan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat kapitalis di atas kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam pengambilan kebijakan.

Politisi sekarang berusaha untuk meningkatkan kesadaran tentang

kebebasan akademik, beasiswa, dan pendanaan pendidikan. Beberapa politisi menjanjikan peningkatan pendidikan, pendidikan gratis, beasiswa, bahkan kebijakan mengangkat guru menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama kampanye Pemilihan Umum, yang masih membekas di ingatan kita. Namun, itu semua tidak lebih dari omong kosong atau janji-janji politik yang belum tentu terwujud secara nyata. Sederhana untuk diucapkan, tetapi sulit untuk diwujudkan. Akibatnya, semuanya sangat tergantung pada keadaan dan suasana politik saat ini.

Sejalan dengan filosofi ini, mendorong para peneliti untuk menyelidiki dampak politik pada kebijakan Sistem Pendidikan Nasional. Perubahan kebijakan kurikulum dipengaruhi oleh kebijakan politik yang berbeda-beda pada setiap pergantian kepemimpinan pemerintahan. Hal ini juga memotivasi guru untuk menyesuaikan perangkat pembelajaran dengan kurikulum yang digunakan. Berdasarkan latar belakang di tersebut, Peneliti menyusun karya ilmiah dengan judul “Kekuatan Politik Dalam Pembentukan Sistem Pendidikan Nasional”

Penelitian ini memiliki dua tujuan: a) menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh politik dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia; dan b) menganalisis dan mengkarakterisasi dampak politik terhadap kurikulum pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik literature review. Desain penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif. Analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan informasi. Analisis model interaktif digunakan untuk menguji data. Menurut Fajriawati dan Harisman (2020), analisis model ini terdiri dari tiga bagian: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang kesemuanya dilakukan secara interaktif sepanjang siklus pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Politik terhadap Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat, dan dapat diamati dalam keadaan ini bahwa politik negara memainkan peran penting dalam menentukan jalur pertumbuhan pendidikan suatu negara. Penelitian Borah (2012) menegaskan hal ini dan menyatakan bahwa pemerintah India telah menerapkan beberapa undang-undang dan perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hal mengadopsi kebijakan baru, pemerintah cukup ketat. Menurut Williams (2017), penerapan analisis penyelesaian politik dapat membantu menjelaskan pola pembangunan dalam ketersediaan dan kualitas pendidikan, serta mengungkap motivasi politik yang mendasarinya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu upaya atau alat untuk mempertahankan wibawa negara adalah pendidikan.

Pendidikan selalu sepihak, dan pendidikan yang ditawarkan pendidik selalu berdasarkan keinginan penguasa yang menentukan kurikulum. Akibatnya, politik dan pendidikan saling terkait. Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat, dan dapat diamati dalam keadaan ini bahwa politik negara memainkan peran penting dalam menentukan jalur pertumbuhan pendidikan suatu negara. Dengan harapan dapat terpilih kembali pada periode berikutnya. Ini adalah elemen yang tak terhindarkan dari proses politik. Dalam konteks ini, pendidikan dapat dipandang sebagai nilai tambah yang dapat didistribusikan secara luas ke seluruh pelosok tanah air, yang secara langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan memberikan hasil yang dapat dilihat di masa depan, atau dengan kata lain, pendidikan bukan hanya terlihat bagus tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dan menengah yang signifikan. Ketika digunakan sebagai prediktor mandiri atau jika digabungkan dengan PDB per kapita, Oishi dan Diener (2014) menemukan bahwa stabilitas politik memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kelangsungan hidup pendidikan.

Selain itu, ada hubungan sebab akibat antara pembangunan ekonomi yang kuat dan stabilitas rezim.

Dari tahun 1947 hingga 2013, kurikulum pendidikan nasional mengalami modifikasi, sesuai dengan garis waktu sejarah kurikulum. Perubahan dalam kurikulum berhubungan dengan pergeseran keadaan politik di negara Indonesia. Sebagaimana diketahui, kurikulum 1947 yang dikenal dengan istilah *Leerplan*, yang berlaku sepanjang masa kemerdekaan, diciptakan untuk kepentingan pemerintah saat itu, terutama kolonialisme Belanda. Program ini berlaku sampai tahun 1952. Kurikulum 1952 merupakan pengembangan dari kurikulum yang diperkenalkan pada tahun 1947, serta diberi nama Rentjana Pelajaran Terurai. Modifikasi atau penyempurnaan masih untuk kepentingan pemerintah pada saat itu, terutama pemerintahan baru Republik Indonesia. Penyelesaian kurikulum 1952 telah mengatur sistem pendidikan nasional, dengan mata pelajaran Di Indonesia, setelah tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum. Pada tahun 1968, pemerintah melakukan putaran perubahan lagi, mengubah kurikulum struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi Pembinaan Jiwa Pancasila, Pengetahuan Dasar, dan Keterampilan Khusus. Modifikasi kurikulum 1968-1975 difokuskan pada perubahan substansi topik dan tujuan pengajaran untuk membuat pendidikan lebih efisien dan efektif. Baru pada tahun 1984 kurikulum berdasarkan kemampuan ditetapkan. Kurikulum tidak banyak berubah hingga berakhirnya kepemimpinan pemerintahan tahun 1998, khususnya pada masa kepemimpinan Orde Baru Presiden Soeharto. yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa politik dan kurikulum saling terkait.

Kurikulum berbasis kompetensi didirikan pada tahun 2004 di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa kepresidenan SBY, pendidikan lebih menekankan kompetensi guru dan siswa. Tiga kali selama SBY menjabat sebagai presiden, kurikulum diubah. Hingga akhirnya pemerintah menetapkan Kurikulum 2013 pada 2013.

Pemerintah juga membuat kebijakan dengan penyederhanaan isi mata pelajaran dalam implementasi kurikulum ini, dan pada 4 Desember 2014, Kurikulum 2013 secara resmi menggantikan KTSP 2006.

Dengan bergesernya kronologi kurikulum, menjadi jelas bahwa realitas politik di Indonesia juga bergeser. Perkembangan kebijakan kurikuler sistem pendidikan nasional mengiringi perubahan politik. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh politik terhadap sistem pendidikan nasional di Indonesia, terlihat dari maraknya perubahan kurikulum. Hal ini sesuai dengan temuan Al Muchtar (2020) bahwa politik berdampak pada pembaruan kurikulum. Untuk menetapkan derajat pencapaian dan hasil yang diinginkan, hasil yang menjadi model revitalisasi kurikulum harus dipantau dan dievaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi akan digunakan untuk memberikan saran bagi pengembangan dan/atau perbaikan kurikulum di masa mendatang. Menurut Bruns dkk. (2011), efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di bawah sistem pendidikan yang terdesentralisasi dan liberal, sebagaimana diatur dalam dokumen kebijakan pendidikan dan pelatihan, memerlukan pemantauan yang lebih ketat terhadap sekolah serta mekanisme umpan balik yang memadai antara pengawas sekolah dan lembaga pendidikan, manajer dan administrator di tingkat distrik.

Anggaran pendidikan di Indonesia juga dipengaruhi oleh politik dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dengan fakta dan praktik yang mendukung pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit 20% dari APBN/APBD. Pada kenyataannya, anggaran pemeliharaan pendidikan yang mencapai 20% dari APBN/APBD terdiri dari gaji guru dan pengeluaran lainnya. Sarana penunjang pendidikan seperti gedung sekolah, lapangan olah raga, dan sarana prasarana lainnya tidak sesuai dengan tuntutan karena adanya inkonsistensi dalam pembiayaan pendidikan. Hal ini didukung oleh temuan penelitian Irawati dan Susetyo (2017) yang menemukan bukti bahwa ada yang salah dengan implementasi sistem

pendidikan nasional Indonesia. Politik anggaran adalah salah satu contoh dari blunder ini.

Politik berdampak pada sumber daya pendidikan seperti gaji guru, fasilitas pengajaran, dan pelatihan. Ketersediaan guru yang terampil adalah salah satu faktor terpenting dalam membangun pengalaman belajar yang bermakna. Kredensial pendidikan dari 2,7 juta guru di Indonesia masih belum memadai, dengan 65 persen menyelesaikan pendidikan guru kurang dari empat tahun. Ketersediaan instruktur yang berkualitas telah diabaikan. Ketika membandingkan profesionalisme guru dengan profesi lain seperti dokter dan pengacara, terlihat jelas bahwa guru masih tertinggal. Guru dan dosen wajib memiliki jenjang pendidikan A1 dan D4+, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Praktik profesional merupakan salah satu kelemahan pendidikan guru sebelum bekerja sebagai guru. Siswa belajar untuk menerapkan informasi akademik profesional mendasar yang berbeda selama tahap ini, yang berlangsung selama dua semester. Siswa menghabiskan dua pertiga waktunya di sekolah untuk mengamati, memimpin, dan membimbing proses pembelajaran di bawah pengawasan sekelompok dosen profesional. Tujuan awal dari kebijakan sertifikasi guru adalah mentransformasikan guru yang ada menjadi pendidik profesional. Karena guru yang mengejar sertifikasi semata-mata termotivasi untuk mengejar tunjangan sertifikasi, setelah mendapatkan sertifikat, tidak ada tanda-tanda mereka berubah menjadi guru profesional, baik dalam merancang, mengembangkan, melaksanakan, menilai, maupun mendiagnosis berbagai permasalahan yang dihadapi siswa. perbedaan antara guru bersertifikat dan tidak bersertifikat. Fakta tersebut sejalan dengan temuan penelitian Suyanto dkk. (2021) bahwa salah satu kegagalan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Indonesia adalah adanya organisasi pendidikan politik dalam mempersiapkan guru profesional.

Pengaruh Politik terhadap Kurikulum Pendidikan Nasional

Setiap pemerintah berusaha memberikan yang terbaik bagi warganya. Ketika pemerintah memperoleh kekuasaan, ia berusaha untuk memproyeksikan citra positif atau bekerja dengan rajin untuk memberikan nilai tambah bagi warganya. Dengan harapan dapat terpilih kembali pada periode berikutnya. Ini adalah elemen yang tak terhindarkan dari proses politik. Dalam konteks ini, pendidikan dapat dipandang sebagai nilai tambah yang dapat didistribusikan secara luas ke seluruh pelosok tanah air, yang secara langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan memberikan hasil yang dapat dilihat di masa depan, atau dengan kata lain, pendidikan bukan hanya terlihat bagus tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dan menengah yang signifikan. Menurut Ogundari dan Awokuse (2018), dalam hal kualitas pendidikan, stabilitas politik jauh lebih penting daripada status ekonomi negara yang diukur dengan PDB per kapita. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa stabilitas politik memainkan peran penting dalam menjelaskan tingkat kelangsungan hidup pendidikan.

Alhasil, setiap menteri pendidikan yang dipilih oleh presiden akan terus berinovasi agar sektor yang diembannya menambah nilai politik. Salah satu industri yang menjanjikan adalah kurikulum pendidikan. Jika seorang kandidat berhasil dalam mata pelajaran pendidikan ini dan mendapatkan dukungan publik, akan sangat mudah untuk mendapatkan suara di pemilu berikutnya. Menurut Healey (2017), hubungan antara politik dan pendidikan mengharuskan warga negara untuk melakukan upaya mereka sendiri dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki situasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Namun, tidak selalu modifikasi kurikulum akan berdampak positif bagi masyarakat. Seperti yang dapat diamati, modifikasi dalam kurikulum Indonesia terus-menerus menghasilkan isu-isu baru. Padahal, terkadang kurikulum sebelumnya sebaiknya dimodifikasi saja daripada dihilangkan sama sekali. Freedman (2018) juga memaparkan dampak politik terhadap desain dan pengembangan kurikulum. Hal ini jelas menunjukkan bahwa proses

politik berdampak pada pengembangan kurikulum, karena seiring dengan perubahan kepemimpinan suatu negara, demikian pula kurikulum pendidikan akan berubah.

Meskipun kekuatan politik terkonsentrasi di berbagai organisasi dan orang, lembaga mempengaruhi kemandirian dan kegunaannya. Struktur kelembagaan pendidikan publik mungkin tampak kokoh dan cukup stabil sehingga ide apa pun harus mengikutinya agar efektif. Salah satu komponen pendidikan yang paling esensial, kurikulum, misalnya, dapat menjadi media sosialisasi politik (Warren & Wicks, 2011). Menurut mereka, ada tiga sumber utama kurikulum di lembaga pendidikan. Pertama, lembaga pelatihan guru memiliki dampak besar pada sikap organisasi profesional pendidikan, yang sering mencerminkan atau memodifikasi gagasan orang-orang yang didewakan seperti John Dewey, John Locke, dan William Stern. Kedua, ada kebutuhan finansial. Ketiga, tindakan kelompok-kelompok kuat seperti asosiasi industri, serikat pekerja, dan banyak organisasi patriotik nasional.

Tujuan politik pendidikan, khususnya, dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran. Proses belajar menurut Lord dan Shondrick (2011) dapat bersifat kognitif (misalnya, memperoleh pengetahuan dasar tentang suatu sistem), afektif (misalnya, mengetahui sikap positif dan negatif terhadap penguasa atau simbol), evaluatif (misalnya, menilai peran politik terhadap standar tertentu), atau motivasi (misalnya, belajar sikap positif dan negatif terhadap penguasa atau simbol) (misalnya, menanamkan rasa partisipasi). Mayoritas aspek pembelajaran ini dapat diciptakan dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan politik tertentu.

Para pemimpin politik di banyak negara otoriter dan berkembang memahami pentingnya pendidikan dalam mencapai tujuan politik. Mereka menggunakan berbagai taktik untuk memberikan pengaruh atas sistem pendidikan dan untuk mengkomunikasikan tema politik melalui metode dan bahan pengajaran pendidikan. Di negara-negara komunis, misalnya, pendekatan cuci otak sering digunakan untuk membentuk otak anak muda

agar sesuai dengan dogma komunis. Menurut Staehell dan Hammett (2013), negara, melalui politisinya, bertanggung jawab untuk mengajar individu apa yang perlu mereka ketahui untuk menjadi warga negara yang produktif. Pemerintah telah menetapkan standar dan tolok ukur, yang telah berkembang menjadi kurikulum standar dalam sistem pendidikan, untuk menjamin bahwa instruktur mencapai apa yang negara ingin mereka lakukan. Metode pembelajaran tradisional yang menyediakan lingkungan belajar standar baik menghasilkan warga negara yang produktif atau pemikir kritis dan kreatif. Kepemimpinan transformatif memerlukan perubahan politik, dan itu harus dimulai dengan sikap moral yang sama seperti orang lain. Pemangku kepentingan harus menghargai masyarakat terbuka yang didasarkan pada nilai-nilai di mana kebebasan berekspresi dilindungi, kesopanan ditegaskan, perbedaan individu diakui dan dipahami, dan pemangku kepentingan menghargai komunitas yang peduli di mana kesejahteraan setiap orang dihargai.

Para negarawan dan pemimpin politik telah mengakui pengaruh pendidikan terhadap politik. Mereka mengerti bahwa jika negara bermaksud untuk memenuhi tujuannya, termasuk melestarikan kekuasaan, negara tidak dapat meninggalkan sekolah. Mengingat potensi besar untuk menyesuaikan berbagai aspek pendidikan dengan tuntutan politik tertentu, tidak mengherankan bahwa pendidikan sering memainkan peran kunci dalam menentukan arah perubahan politik. Menurut Sukasni dan Efendy (2017), pengaruh politik terhadap sistem pendidikan dapat menimbulkan anomali dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional Indonesia. Dukungan politik, baik itu politik dalam perumusan tujuan pendidikan, politik anggaran, maupun politik organisasi pendidikan seperti menyiapkan guru profesional, alat persiapan, inkonsistensi antara tujuan pendidikan dan praktik pendidikan, serta tujuan dan model evaluasi pendidikan, semuanya dapat dilihat sebagai contoh kesalahan ini. Menurut Sukasni dan Efendy (2017), pengaruh politik terhadap sistem pendidikan dapat menimbulkan anomali dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional

Indonesia. Dukungan politik, baik itu politik dalam perumusan tujuan pendidikan, politik anggaran, maupun politik organisasi pendidikan seperti menyiapkan guru profesional, alat persiapan, inkonsistensi antara tujuan pendidikan dan praktik pendidikan, serta tujuan dan model evaluasi pendidikan, semuanya dapat dilihat sebagai contoh permasalahan dalam kurikulum.

Kurikulum mengacu pada aturan dan tata cara yang digunakan suatu lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan atau lembaga pendidikan. Kurikulum dianggap penting dalam pendidikan karena kurikulum terutama ditentukan oleh suatu pendidikan untuk dapat mencetak *output*, yang juga dikenal sebagai siswa yang berkualitas dan baik. Karena kurikulum baru belum tentu cocok untuk siswa atau diterima oleh anak-anak ini, dan bahkan mungkin siswa tidak siap untuk sistem baru yang mungkin sulit bagi mereka, mengapa sistem pendidikan hampir selalu berubah di Indonesia? Itulah sebabnya sekolah atau lembaga pendidikan tidak bergantung pada satu sistem atau kurikulum sehingga siswa dapat beradaptasi dan menerimanya secara efektif.

Penghapusan dan penambahan sejumlah mata pelajaran, seperti Kurikulum 2013, merupakan contoh dampak politik terhadap implementasi kurikulum. Guru merasa resah Ketika harus menghilangkan dan menggabungkan banyak topik. Alasannya karena mereka harus mematuhi persyaratan jam mengajar minimum 24 jam pengajaran. Mata pelajaran IPA kelas X SMK telah dieliminasi dalam Kurikulum 2013. Contoh lainnya adalah penghapusan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sekolah menengah pertama dan atas. Penggabungan banyak topik memiliki konsekuensi bagi guru, yang akan memiliki lebih sedikit atau tidak ada jam mengajar. Guru khawatir tidak bisa memenuhi kriteria standar kompetensi jam mengajar.

Kekurangan guru yang berkualitas adalah pengaruh politik lain pada kurikulum. Karena prevalensi modifikasi kurikuler, instruktur diminta untuk memahami dan melaksanakan kurikulum. Namun, masih banyak

guru yang belum paham dengan kurikulum. Terlihat dari beberapa guru yang belum mampu menyusun silabus dan RPP sesuai dengan standar pemerintah untuk pengembangan sumber belajar. Hal ini sebanding dengan hasil penelitian dari Ahsan dkk. (2012) yang menemukan bahwa elemen terpenting dalam kualitas pendidikan anak adalah kualitas instruktur mereka sendiri, tetapi guru memiliki waktu yang lebih sulit dari sebelumnya karena peningkatan pendaftaran guru dan pelatihan pralayanan berkurang. Hal ini berdampak besar pada bagaimana kurikulum diterapkan di kelas karena instruktur yang hanya mendapatkan beberapa jam pelatihan tidak cukup tahu tentang dasar-dasar kurikulum dan psikologi siswa.

Tujuan pemerintah mengubah kurikulum pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat berkembang lebih efektif dari sebelumnya. Kenyataannya, tidak ada perbaikan dalam tingkat pendidikan yang diberikan di Indonesia, dan kualitas pendidikan telah menghasilkan hasil yang tidak memuaskan selama lima tahun terakhir. Pada kenyataannya, perubahan kurikulum pendidikan yang cepat telah menimbulkan kesulitan baru di bidang pendidikan. Penurunan ini mungkin karena ketidakmampuan siswa untuk menyesuaikan diri dengan pendekatan pembelajaran kurikulum baru.

SIMPULAN

Anggaran pendidikan dan sumber daya pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh politik dalam Sistem Pendidikan Nasional. Politik juga berdampak pada revisi kurikulum. Telah terjadi perubahan kurikulum dari tahun 1947 ke tahun 2013, sesuai dengan kronologis sejarah kurikulum pendidikan nasional. Perubahan kurikulum tersebut tampaknya berbarengan dengan pergeseran kondisi politik Indonesia. Perkembangan kebijakan kurikuler sistem pendidikan nasional mengiringi perubahan politik. Hal ini menunjukkan adanya dampak politik terhadap sistem pendidikan nasional di Indonesia, terlihat dari perubahan kurikulum.

Dampak politik yang nyata pada kurikulum dalam sistem pendidikan nasional adalah penghapusan berbagai topik, serta pengurangan dan integrasi konten mata pelajaran, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Proses pembuatan kurikulum yang selalu berubah juga dipengaruhi oleh variabel eksternal yang memicu emosi manusia sesuai dengan minatnya. Dorongan untuk mengubah kurikulum menunjukkan pentingnya pendidikan sebagai wadah untuk melanjutkan pertumbuhan bangsa dan negara. Komponen-komponen yang mempengaruhi konstruksi dan evolusi kurikulum saling berhubungan. Dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi penciptaan kurikulum mencerminkan idealisme dan tuntutan perubahan masyarakat dan negara, seperti yang diungkapkan melalui lembaga sekolah yang akan melestarikan budaya.

Pertimbangan politik memiliki dampak yang signifikan pada pendidikan, dan modifikasi kurikulum yang dipengaruhi oleh alasan politik telah menghasilkan banyak masalah baru. Pembuat kebijakan di bidang pendidikan, di sisi lain, tetap tidak peduli dan menolak mengambil langkah apapun untuk membebaskan pendidikan dari kegiatan komersial politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, M. T., Sharma, U., & Deppeler, J. M. (2012). Exploring Pre-Service Teachers' Perceived Teaching-Efficacy, Attitudes and Concerns about Inclusive Education in Bangladesh. *International Journal of Whole Schooling*, 8(2), 1–20.
- Al Muchtar, S. (2020). Pendekatan pendidikan etika politik Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Majelis*, 5, 47–64.
- Borah, R. R. (2012). Impact of politics and concerns with the Indian education system. *International Journal of Educational Planning & Administration*, 2(2), 2249–2293.
- Bruns, B., Filmer, D., & Patrinos, H. A. (2011). *Making schools work: New evidence on accountability reforms*. The World Bank.
- Fajriawati, & Harisman. (2020). Application of the Gallery Walk Method to Increase Activities and Learning Achievement of Law Students in Pancasila Education Courses. *International Journal Reglement & Society*, 1(2), 86–92.

- Freedman, K. (2018). *Art education as social production: Culture, society, and politics in the formation of curriculum*. Routledge.
- Healey, P. (2017). Planning through Debate 1: The Communicative Turn in Planning Theory 2. In J. Hillier & J. Metzger (Eds.), *Connections: Exploring Contemporary Planning Theory and Practice* (pp. 241–255). Routledge.
- Irawati, E., & Susetyo, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Blitar. *Jurnal Supremasi*, 7(1), 3.
- Lord, R. G., & Shondrick, S. J. (2011). Leadership and knowledge: Symbolic, connectionist, and embodied perspectives. *The Leadership Quarterly*, 22(1), 207–222.
- Ogundari, K., & Awokuse, T. (2018). Human capital contribution to economic growth in Sub-Saharan Africa: does health status matter more than education? *Economic Analysis and Policy*, 58, 131–140.
- Oishi, S., & Diener, E. (2014). Residents of poor nations have a greater sense of meaning in life than residents of wealthy nations. *Psychological Science*, 25(2), 422–430.
- Staehell, L. A., & Hammett, D. (2013). Educating the new national citizen: Education, political subjectivity and divided societies. In J. Pykett (Ed.), *Governing Through Pedagogy: Re-educating Citizens* (pp. 61–74). Routledge.
- Suyanto, Hasibuan, L., & Anwar, K. (2021). Konsep dasar ekonomi pendidikan pada tataran suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 143–150.
- Warren, R., & Wicks, R. H. (2011). Political socialization: Modeling teen political and civic engagement. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 88(1), 156–175.
- Williams, T. P. (2017). The political economy of primary education: Lessons from Rwanda. *World Development*, 96, 550–561.